

## PJ BUPATI MUNA INTENS SIDAK PASAR ANTISIPASI INFLASI



Sumber gambar :  
<https://www.rri.co.id/>

### Isi Berita:

KBRN , Kendari : Dalam upaya mengantisipasi inflasi , Pemerintah Kabupaten Muna melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gudang Bulog Raha serta Pasar Laino.

Langkah ini telah menjadi rutinitas bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjamin ketersediaan stok, keterjangkauan harga dan kelancaran redistribusi.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Muna, Yuni Nurmalawati mengatakan sidak untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau stabilitas harga komoditas pangan di pasar.

“Sidak dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan beras bisa tercukupi dengan adanya stok dari Bulog. Untuk harganya juga sudah sesuai dengan harga yang sudah diatur. Bulog juga dilarang untuk bermain harga, karena ada harga enceran tertinggi (HET). Karena ini adalah komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah,” ujarnya, Senin (30/09/2024).

Ia menambahkan, hasil sidak menunjukkan stok bahan pokok di gudang Bulog, baik beras, gula dan minyak goreng tercukupi.

Harga kebutuhan di Pasar Laino juga terpantau stabil termasuk telur, cabai serta minyak goreng.

“Stok aman hingga beberapa bulan kedepan. Dalam waktu dekat juga Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras dari Badan Ketahanan Pangan Nasional kepada masyarakat Muna. Diharapkan, stok bahan pokok di Muna terus tercukupi,” tambahnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1014839/pj-bupati-muna-intens-sidak-pasar-antisipasi-inflasi>, Pj Bupati Muna Intens Sidak Pasar Antisipasi Inflasi, tanggal 30 September 2024; dan
2. <https://sultraline.id/pjs-bupati-muna-bersama-tpid-dan-satgas-pangan-gelar-sidak-di-gudang-bulog-dan-pasar-laino/>, Pjs Bupati Muna Bersama TPID dan Satgas Pangan Gelar Sidak di Gudang Bulog dan Pasar Laino; tanggal 28 September 2024.

### **Catatan:**

- Sidak pasar merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah, selain operasi pasar murah dan menjalin kerja sama antardaerah.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan Memantau dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi.
- Terkait permasalahan diatas diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, pada:
    - 1) Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, “Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”
      - a. Pasal 2:
        - a) ayat (1) yang menyatakan, “Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:
          - a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
          - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
  - b) ayat (2) yang menyatakan, “Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;”
  - c) ayat (3) yang menyatakan, “Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko;”
  - d) ayat (4) yang menyatakan, “Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 poin I nomor 4 pada Tabel, berdasarkan Arah kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2024 terkait Pengendalian inflasi dengan sasaran tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5% - 3,5% secara *year on year* dengan fokus pembinaan dan pengawasan umum yang terbagi 2, yaitu:
- 1) Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:
    - a. ketersediaan pasokan;
    - b. keterjangkauan harga; dan
    - c. kelancaran distribusi;
  - 2) Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:
    - a. pemantauan harga dan stok barang;
    - b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
    - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
    - d. penanaman gerakan menanam;
    - e. operasi pasar murah;
    - f. sidak ke pasar dan distributor;
    - g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi;
    - h. merealisasikan belanja tidak terduga; dan
    - i. memberikan bantuan transportasi.